

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly., *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- ., *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Bello, Petrus C.K.L., *Hukum & Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Gaffar, Janedjri M., *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konpress, Jakarta, 2013.
- Hamzah, Andi., *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Indra, Meksasai., *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Iqbal, Moch., *Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PHPU.D-VIII/2010)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2011.
- Kelsen, Hans., *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1983.
- Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo., *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- ., *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1979.
- Panggabean, Jan Hider Oslan., *Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan Kepala Negara Studi Kasus Terdakwa Atas Nama Monang Johannes Tambunan*,

S.T. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.

Prihatmoko, Joko J., *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Prodjohamidjojo, Martiman., *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

-----., *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Samudera, Teguh., *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.

Sasangka, Hari., *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2005.

Siahaan, Maruarar., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sunar Grafika, Jakarta, 2012.

Sodikin., *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata, Bekasi, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.

Soetarna, Hendar., *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Alumni, Jakarta, 2011.

Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

Suharizal., *Pemilukada: Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Syahrani, Riduan., *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.

II. UNDANG-UNDANG

UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

UU RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

III. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PHPU.D-VI/2008 terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008.